

IMPLEMENTASI *DEFENCE DIPLOMACY* MILITER INDONESIA DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK LEBANON

Satriya Wibawa¹, Arfin Sudirman², Hanan Tasmika Selian³, Falhan Hakiki⁴, Karina Erdian Hapsari⁵, dan Yusa Djuyandi⁶

^{1, 2, 3} Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

⁴ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Jl. PB Sudirman (Kampus Sudirman) Denpasar, Bali, Indonesia, 80234

⁵ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

⁶ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 456363

Email: satriya.wibawa@unpad.ac.id; arfin.sudirman@unpad.ac.id; hanantasmika@gmail.com; falhan@unud.ac.id; karinaerdian@utu.ac.id; yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Submitted: 03-11-2025; Accepted: 29-12-2025; Published :29-12-2025

ABSTRAK

Perang saudara Lebanon yang belum terselesaikan menimbulkan konflik baru antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia diperbolehkan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL) untuk rekonsiliasi di Lebanon. Konsekuensinya, peran Indonesia dalam *defence diplomacy* menjadi penting untuk menyelesaikan konflik Lebanon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari studi literatur, jurnal, berita, dan sumber daring yang berkaitan dengan implementasi *defence diplomacy* militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Lebanon. Data-data tersebut kemudian divalidasi dengan triangulasi data lewat mencocokkan kesesuaian data dari *peacekeepers* Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta juga membandingkannya terhadap berbagai sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa sampai batas tertentu, Indonesia telah berhasil melakukan tujuan *defence diplomacy* melalui misi *Civil-Military Coordination* (CIMIC). Selain itu, militer Indonesia telah membangun kembali citra masa lalunya di mata dunia internasional dan memperkuat *Confidence Building Measures* (CBM) di antara negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon maupun negara-negara pendonor. Dengan keberhasilan kegiatan *defence diplomacy*, Indonesia membuka jalan untuk menjalin kerja sama baru dengan aktor negara atau non-negara di bidang pertahanan dan lainnya.

Kata kunci: *Defence Diplomacy*; Indonesia; Lebanon; Tentara Nasional Indonesia; Penjaga Perdamaian

ABSTRACT

The unresolved Lebanese Civil War precipitated a new conflict between Israel and Lebanon in 2006. In accordance with UN Security Council Resolution 1701 and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia was authorized to deploy peacekeeping forces under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to support reconciliation efforts. Consequently, Indonesia's role in defense diplomacy became pivotal in resolving the conflict. This study employs a qualitative method utilizing secondary data derived from literature reviews, academic journals, news reports, and online sources pertaining to the implementation of Indonesian military defence diplomacy in peace efforts for the Lebanon conflict. The collected data were subsequently validated through triangulation by cross-referencing information from Indonesian peacekeepers, the Ministry of Defence, and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as comparing it

Doi:10.24198/aliansi.v4i3.67801

with various secondary sources. The findings reveal that, to a certain extent, Indonesia has successfully achieved its defense diplomacy objectives through the Civil-Military Coordination (CIMIC) mission. Furthermore, the Indonesian military has restored its international reputation and strengthened Confidence Building Measures (CBM) among nations involved in the peacekeeping mission as well as donor countries. Through the success of these defense diplomacy activities, Indonesia has paved the way for establishing new cooperation with state and non-state actors in the defense sector and beyond.

Keywords: Defence Diplomacy; Indonesia; Lebanon; Indonesian Armed Forces; Peacekeepers

PENDAHULUAN

Politik bebas aktif Indonesia berupaya semampunya dalam segala misi perdamaian dunia baik dalam bentuk intervensi militer maupun nonmiliter. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Perdamaian dalam kata tersebut memiliki makna luas di mana Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam menjaga perdamaian tidak terbatas terhadap wilayah Indonesia saja melainkan negara-negara lain yang menjadi perhatian bagi Indonesia.

Keterlibatan Indonesia dalam ketertiban dunia salah satunya bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana dalam salah satu pengaplikasiannya Indonesia bergabung kedalam pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Lebanon menjadi perhatian Indonesia semenjak terjadinya perang sipil yang berkelanjutan. Pada tahun 2006, Indonesia yang dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan gencarnya mengirimkan pasukan perdamaianya yakni Kontingen Garuda (KONGA) yang diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke wilayah Lebanon dan mulai melakukan misi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengiriman pasukan ini dilatar belakangi oleh Israel menyerang dan menduduki wilayah Lebanon Selatan pada tahun 2006 yang mengakibatkan kematian 1.140 jiwa serta 4.000 masyarakat Lebanon yang terluka dalam jangka waktu 33 hari. Selain korban jiwa, terdapat sekitar 900.000 masyarakat yang harus mengungsi serta 15.000 rumah mengalami kehancuran (Ayala, 2006).

Indonesia memiliki kekerabatan dengan Lebanon mengingat negara ini merupakan negara ketiga yang mengakui atas kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Indonesia dan Lebanon sudah menjalin hubungan diplomatik secara resmi pada tahun 1950 yang dijalin melalui Kedutaan

Besar Republik Indonesia di Kairo. Hingga pada pertengahan tahun 1950, Indonesia secara resmi mendirikan kedutaan besarnya di kota Beirut. Atas kekerabatan yang bersejarah tersebut serta landasan konstitusional maka Indonesia memiliki kewajiban serta rasa tanggungjawab kemanusiaan untuk melaksanakan misi perdamaian terhadap konflik yang terjadi di Lebanon.

Keterlibatan Indonesia dalam menjaga perdamaian di beberapa negara ada sebelumnya. Pada masa pemerintahan presiden SBY penambahan kualitas dan kuantitas pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang dialokasikan ke negara-negara lainnya di dasari oleh identitas serta kepentingan mempengaruhi tindakan dari suatu negara (Syahputri & Pattipelohy, 2018). Selain menjalankan misinya sebagai penjaga keamanan, juga membawa Indonesia menjadi lebih dekat dengan masyarakat di negara lain dan keberadaan KONGA tersebut Indonesia menyisipkan misi diplomasi publik yang dilakukan terhadap masyarakat Lebanon serta negara-negara yang tergabung di dalam UNIFIL lainnya (Rachmat, 2017). Pemerintah Indonesia berupaya mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam misi memelihara perdamaian terhadap negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata (Hutabarat, 2018). Kepentingan nasional ini dijalankan lewat serangkaian aksi seperti latihan militer bersama serta meningkatkan kemampuan alat dan pasukan khususnya gugus tugas maritim (Umma & Tjarsono, 2019). Kepentingan nasional yang dibawa dalam *defence diplomacy* membentuk citra positif TNI dan Indonesia, namun belum mencapai keberhasilan dalam memberikan kepentingan ekonomi dan

hanya sebatas dalam kepentingan pertahanan saja (Sudarsono, Mahroza, & Waluyo, 2018).

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang dipaparkan serta penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan yaitu menganalisis upaya Indonesia yang diwakili oleh *peacekeeping force* Indonesia di UNIFIL terhadap perdamaian dunia. Disisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu melakukan kajian yang di dominankan terhadap peran militer dalam melakukan kebijakan dan bukan berfokus terhadap kementerian luar negeri yang merupakan komponen utama dalam melaksanakan kepentingan nasional Indonesia di tingkat internasional. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana TNI mengambil suatu kebijakan, tindakan, serta bagaimana *point of view* yang digunakan untuk menjalankan tugas-tugas diplomasi khususnya dalam misi penyelesaian sebuah konflik. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam lingkup regional maupun global memiliki peran penting dalam pembangunan nasional Indonesia (Yani & Montrana, 2018). Tidak hanya institusi pemerintahan sipil, institusi TNI dalam hal ini mampu mendapatkan peran signifikan dalam kebijakan luar negeri untuk melancarkan pembangunan nasional. Misi perdamaian dunia membuka peluang baru bagi TNI untuk berkecimbung di dunia internasional dan dapat berperan aktif dalam sebuah tugas diplomasi.

Defence diplomacy merupakan seni untuk meraih kepentingan nasional dengan menggunakan kapabilitas pertahanan (Simamora, 2013). Dalam hal ini kita dapat menjabarkan kapabilitas pertahanan tidak hanya mencakup kemampuan militer dalam mengatasi situasi perang melainkan kemampuan militer untuk menarik simpati masyarakat Internasional atas tindakan yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menjaga perdamaian.

Perluasan pengaplikasian *defence diplomacy* dilakukan oleh negara-negara lain baik di wilayah Eropa maupun Amerika dan Asia. Menurut Cottey dan Foster (2004), istilah *defence diplomacy* dapat merujuk atau memiliki persamaan dengan istilah *military diplomacy* sehingga sebagian literatur menyamakan konsep ini. Cottey dan Foster juga mengatakan bahwa sumber-sumber *defence diplomacy* harus dicari di dalam *military diplomacy* sehingga bisa disimpulkan bahwa konsep *defence diplomacy* merupakan suatu bagian khusus dari *military*

diplomacy di mana militer serta bagian-bagian yang berhubungan seperti kementerian pertahanan merupakan alat dan sebagai aktor utama untuk mencapai kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan (Cottey & Forster, 2004).

Aktivitas *defence diplomacy* tidak hanya bermotif untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara melainkan terdapat nilai-nilai universal yang menjadi tujuan bersama. *Defence diplomacy* digunakan selain untuk memperkuat relasi antar negara dalam bidang pertahanan juga mempromosikan hukum internasional. Untuk lebih memahami pernyataan tersebut berikut merupakan tujuan dari *defence diplomacy* antara lain: *Strategic Engagement* di mana *defence diplomacy* bertujuan menjalin hubungan baik di mana hal tersebut akan menghindari konflik terhadap setiap negara yang memiliki potensi sebagai musuh; *Promoting Democratic Civil-Military Relations* di mana *defence diplomacy* dapat mempromosikan nilai-nilai demokrasi ke dalam hubungan sipil-militer; *Enhancing Regional Peacekeeping Capabilities* dimana *defence diplomacy* dijadikan alat untuk mempromosikan *peacekeeping* terhadap negara partner. *Peacekeeping* merupakan suatu komponen krusial yang diperlukan negara-negara konflik termasuk di negara Lebanon (Cottey & Forster, 2004).

Kemudian, *Peacekeeping* merupakan keterlibatan militer, namun tanpa wewenang penegakan (*enforcement powers*), yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah konflik. (United Nations, 1996). *Peacekeeping* telah terbukti sebagai salah satu alat paling efektif PBB untuk membantu negara-negara menavigasi konflik menuju perdamaian. *Peacekeeping* memiliki kemampuan unik seperti legitimasi, pembagian masalah, dan kemampuan untuk menerjunkan pasukan militer serta polisi ke seluruh dunia serta mengintegrasikan hal tersebut dengan aparatur perdamaian sipil untuk meningkatkan mandat multidimensi.

Peacekeepers PBB sebagai aktor yang menjalankan *peacekeeping operations*

dalam tiga bentuk pelaksanaannya: Pertama, Proses *Peacekeeping*: merupakan tindakan perantara yang dilakukan oleh pasukan bersenjata internasional untuk memisahkan pasukan pemberontak, perantara tersebut juga terkait dengan masyarakat sipil seperti pemantauan dan pengawasan untuk mendukung intervensi kemanusiaan (Sempiga, 2017). Upaya *peacekeeping* merupakan suatu tindakan pencegahan terhadap konflik yang kemungkinan akan terjadi. Pencegahan yang dilakukan dalam upaya *peacekeeping* dilakukan tanpa tujuan untuk mencari tahu akar permasalahannya ataupun mencoba untuk merubah tatanan masyarakat seperti yang dilakukan dalam upaya *peacebuilding*. Tindakan-tindakan *peacekeeping* diupayakan dalam tiga hal seperti menginterupsi untuk mencegah konflik yang sedang berlangsung, mengurangi intensitas dan durasi konflik agar tidak meluas secara geografi, serta memberikan ruang kedua belah pihak yang sedang berkonflik agar melakukan gencatan senjata (Ramsbotham, Woodhouse, & Miall, 2006). Kedua, *Peacemaking*: tindakan yang digunakan untuk penyelesaian konflik bersenjata, di mana pihak-pihak yang berkonflik didorong untuk melakukan perjanjian damai secara sukarela (Sempiga, 2017). Berkurangnya konflik merupakan hal yang baik karena mencerminkan keberhasilan upaya dan intervensi perdamaian di tingkat regional, kontinental, dan internasional. Mediasi dan intervensi pihak ketiga adalah bagian penting dalam *peacemaking*. Media internasional menjadi menarik, dengan melibatkan organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam aktivitas *peacemaking*. Pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk mengambil langkah bersama menuju pilihan penyelesaian damai dan kemudian mencapai pilihan yang masing-masing lebih mereka sukai daripada melanjutkan konflik. Untuk melakukan hal ini, para pihak harus menciptakan kepercayaan, atau jaminan yang cukup, bahwa mereka akan berkomitmen terhadap apa yang mereka janjikan (Sempiga, 2017). Ketiga, *Peacebuilding*: merupakan dukungan terhadap upaya *peacemaking* dan *peacekeeping* dengan menangani masalah struktural serta hubungan jangka panjang antara pihak yang berkonflik (Sempiga, 2017). Untuk langkah awal, *peacebuilding* merupakan “*postwar reconstruction*” di mana pihak penengah membantu kedua belah pihak yang selesai berkonflik untuk mengawasi gencatan senjata, demobilisasi, rehabilitasi, merestrukturisasi dan mengintegrasikan angkatan bersenjata nasional

yang baru (Sempiga, 2017). Setelah melakukan tahap awal maka tindakan *peacebuilding* berupaya untuk memperbaiki tatanan nasional seperti rekonstitusi pengadilan, melatih kepolisian, mempromosikan HAM, rekonstruksi administrasi publik dan lain-lain (Sempiga, 2017).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan memberikan penekanan terhadap interpretasi. Diperlukan kemampuan interpretasi yang baik untuk mencari dan memahami permasalahan dan mampu menggeneralisasikan makrointerpretasi ke dalam fokus penelitian (Stake, 2010). Penulis menggunakan makrointerpretasi yang berasal dari berbagai institusi, seperti Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta *Indonesia Peace and Security Center*, yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam misi perdamaian dan para pengambil kebijakan mengenai pengiriman Kontingen Garuda ke wilayah Lebanon.

Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah terkumpulkan dan tersedia dari sumber-sumber. Data sekunder juga lebih cepat dan mudah didapatkan dan menjadi alternatif ketika data primer tidak tersedia. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur di mana peneliti mencari data yang bersumber dari jurnal, buku, serta dokumen lainnya yang didapatkan baik secara daring maupun langsung. Data-data yang dikumpulkan berkaitan dengan implementasi atau praktik *defence diplomacy* militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Lebanon, termasuk literatur-literatur yang berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Urgensi pemilihan data sekunder tersebut diperlukan untuk menunjukkan misi perdamaian di Lebanon sejalan dengan tujuan *defence diplomacy* militer Indonesia, serta menegaskan kembali arah dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang memberikan keuntungan yaitu promosi kekuatan militer Indonesia

dan citra positif negara dalam misi perdamaian. Selain itu, data-data sekunder berisi pembahasan-pembahasan yang didapatkan dari para aktor yang terlibat langsung di “dunia” *defence diplomacy* pada saat proses perdamaian di konflik Libanon.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis wacana. Analisis wacana dilakukan dalam tiga tahapan yaitu (Lamont, 2015): Pertama, dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengelompokan data yang diperoleh. Kedua, dilakukan dengan menelaah data yang didapatkan dan divalidasi dengan cara triangulasi. Ketiga, dilakukannya proses penemuan konteks wacana tertentu yang digunakan oleh aktor yang termuat di dalam data. Untuk melakukan hal tersebut dilakukan penelaahan data yang sudah valid dan diasosiasikan dengan makna tertentu yang ada di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki pesan konstitusi untuk melaksanakan perdamaian dunia akan menuntut setiap kepala pemerintahan untuk merancang strategi kebijakan luar negeri mengenai hal tersebut. Pada tahun 2010 silam, presiden Susilo Bambang Yudhoyono demi menunjang hal tersebut secara resmi melakukan suatu program bernama MEF (*Minimum Essential Forces*) untuk menunjang keahlian militer berada di tingkat modern. Program ini dilakukan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam rangka pemeliharaan dan pembelian persenjataan yang mengalami embargo sejak tahun 1999 (Sukadis, 2018).

Terjadinya konflik yang memakan banyak korban jiwa dan menghancurkan stabilitas negara Libanon serta negara-negara tetangga yang mendapat pengaruhnya merupakan suatu fenomena yang memerlukan berbagai macam tindakan dari berbagai macam aspek termasuk dari kebutuhan menjalankan *defence diplomacy*. Kontingen Garuda yang merupakan bagian dari UNIFIL sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu strategi Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negerinya terhadap negara-negara yang sedang mengalami konflik seperti Libanon. Dalam kasus ini, peneliti membuat suatu kerangka pemikiran untuk lebih memahami serta sebagai penjelasan sementara mengenai peran *defence diplomacy*

militer Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Libanon.

Salah satu pengaplikasian *Defence diplomacy* militer Indonesia ialah dengan cara pengiriman pasukan keamanan ke wilayah negara yang memerlukan perdamaian. Dalam hal ini Indonesia dengan mandat Perserikatan Bangsa-bangsa bersama negara-negara anggota lain mengirimkan pasukan perdamaianya dan bergabung ke dalam *peacekeeping force* khusus Libanon yaitu UNIFIL. Kontingen Garuda melaksanakan operasi *peacekeeping* yang terbagi menjadi dua bagian yaitu operasi perang dan operasi nonperang. Meskipun operasi perang bukan merupakan merupakan tujuan utama namun dapat dilihat bahwa Kontingen Garuda berada di lokasi dengan dipersenjatai oleh pemerintah Indonesia maupun PBB. sedangkan operasi nonmiliter, Kegiatan Kontingen Garuda dominan melakukan kegiatan kemanusiaan seperti membuka posko kesehatan gratis, mengajar di berbagai sekolah, dan memberikan bantuan logistik.

Upaya Implementasi *Defence Diplomacy* Pasukan Perdamaian Indonesia dalam Mengatasi Konflik di Libanon

a. *Strategic Engagement: Joint Exercise Military* Indonesia dan Amerika Serikat

Situasi konflik yang semakin kompleks antara Israel dan Hezbollah di wilayah Libanon Selatan membuat negara-negara yang menjadi bagian dari UNIFIL melakukan peningkatan kapabilitas pasukannya untuk mengatasi berbagai dinamika permasalahan yang terjadi. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, Indonesia yang merupakan negara pendonor terbesar dalam pasukan perdamaian yang tergabung di dalam UNIFIL ikut serta juga dalam meningkatkan kapabilitas pasukannya untuk meningkatkan keberhasilan dalam berbagai misi yang di tugaskan di medan konflik Libanon. Untuk meningkatkan performa pasukan perdamaian Indonesia tersebut, maka peningkatan aktivitas *defence diplomacy* menjadi jalan bagi Indonesia untuk mempersiapkan pasukannya dalam hal pengetahuan, keahlian, serta relasi antar militer akan berguna dalam mengatasi

permasalahan yang terjadi khususnya di wilayah Lebanon Selatan.

Joint exercise atau kerja sama dalam pelatihan militer merupakan bagian dari aktivitas *defence diplomacy* yang dilakukan oleh militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik di Lebanon. Keterlibatan Indonesia dalam konteks misi perdamaian dunia menuntut Indonesia untuk meningkatkan kemampuan militernya dalam upaya operasi militer selain perang seperti pengetahuan komunikasi, negosiasi dan pemberdayaan sumber daya manusia yang diterapkan kepada negara yang sedang mengalami konflik. Indonesia melakukan kerja sama pelatihan kemiliteran dengan Amerika Serikat secara komprehensif dilakukan sejak tahun 2007 dengan dibentuknya kegiatan *Garuda Shield*. *Garuda Shield* merupakan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal kemiliteran yang dilakukan setiap tahun dengan TNI AD sebagai tuan rumahnya (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2019). Pada tahun 2006, presiden Susilo Bambang Yudhoyono berinisiasi untuk bergabung dengan pasukan UNIFIL yang dilakukan untuk merealisasikan peran aktif Indonesia untuk perdamaian dunia. Dengan kondisi konflik serta tugas yang terbilang baru bagi TNI, maka presiden Yudhoyono berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militernya dengan melakukan berbagai pelatihan yang salah satunya merupakan kegiatan *joint exercise* dengan Amerika Serikat.

Kegiatan *Garuda Shield* mengambil tema "*Peace Support Operation and Civil Military Operations*" di mana dalam tema tersebut militer Indonesia berupaya mempelajari bagian terpenting mengenai interaksi yang berorientasi kepada kultur dari negara yang menjadi wilayah penerjunan pasukan perdamaian. Pemahaman kultur suatu negara menjadi poin utama dalam keberhasilan pasukan perdamaian dalam menduduki wilayah tersebut dikarenakan dengan hal tersebut interaksi antara militer dan sipil akan mengalami kedekatan emosional yang menjadi suatu jembatan bagi militer untuk menyelesaikan berbagai macam masalah.

Kegiatan *Garuda Shield* merupakan kegiatan tahunan yang bersifat bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Namun pada tahun 2008, 2009 hingga 2010, kegiatan ini dimodifikasi menjadi kerja sama multilateral dalam operasi perdamaian (Inkriwang, 2021). Dikarenakan *Garuda Shield* merupakan kegiatan yang bertujuan dalam upaya perdamaian dunia maka kegiatan tersebut mendapatkan arahan serta

bimbingan dari GPOI (*Global Peace Operations Initiative*). Pada tahun 2009, Jenderal Djoko Santoso membuka kegiatan *Garuda Shield* yang bersifat multilateral dengan keikutsertaan dari beberapa negara seperti Bangladesh, Kamboja, Mongolia, Nepal, Filipina, Republik Tongo, Thailand, serta Amerika Serikat (Bhatti, 2009).

Kegiatan *Garuda Shield* dilakukan secara multilateral selama tiga tahun hingga pada tahun 2011 kegiatan tersebut diubah kembali menjadi kerja sama bilateral. Kegiatan *Garuda Shield* disempurnakan dengan tiga aktivitas utama yaitu (*Command Post Exercise*) (CPX), *Field Training Exercise* (FTX), dan *Humanitarian Civic Action Project* (Douglas, 2011). Aktivitas CPX merupakan pelatihan untuk menyelesaikan *complex security crisis*. Pelatihan ini akan memberikan kemampuan kepada *peacekeepers* Indonesia untuk mengamankan dan mengevakuasi masyarakat sipil yang sedang mengalami ancaman dari kekacauan politik dan lingkungan. FTX merupakan aktivitas yang berfokus kepada *Counter Improvised Explosive Device*. Dalam kegiatan ini, pasukan *peacekeepers* Indonesia akan dilatih dengan simulasi seperti layaknya di medan konflik. Dikarenakan *counter Improvised Explosive Device* menjadi fokusnya maka pasukan *peacekeepers* Indonesia akan dilatih untuk mampu menangani bahan peledak yang biasa dilakukan oleh teroris untuk meledakkan sebuah tempat. Sedangkan untuk aktivitas *Humanitarian Civic Action Project* berfungsi untuk melatih *peacekeepers* Indonesia dalam membantu membangun pusat komunitas dan pasar publik untuk kebutuhan masyarakat lokal seperti yang dilakukan di wilayah Bogor (Cole, 2011).

Pada tahun 2012, kegiatan *Garuda Shield* diikuti oleh 400 tentara Indonesia dan 100 tentara Amerika Serikat dengan fokus terhadap upaya *Peacekeeping* dan *stability operations* (Hiebertand & Magpile, 2012). Kegiatan tersebut diawali dengan kegiatan langsung ke lapangan dengan diterjunkannya tentara Indonesia bersama Amerika Serikat untuk membantu komunitas serta keluarga yang terkena dampak bencana alam di Malang pada tahun 2012. Pada tahun 2013, *Garuda Shield* berfokus terhadap pelatihan *airbone operation*. Pelatihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas

operasi perdamaian dunia yang telah diadopsi sejak tahun 2007 (Inkriwang, 2021). Dalam pelatihan tersebut terdapat 500 penerjun payung yang dilatih oleh divisi 82 airborne Amerika Serikat (Inkriwang, 2021). Pelatihan tersebut menggunakan helikopter 'Black Hawk' dan 'a C-17 Globemaster III' dari Amerika Serikat serta 'Hercules C-130' yang merupakan kendaraan udara milik Indonesia (Meister, 2013).

Peran dari pemimpin negara memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan konsep *defence diplomacy* Indonesia khususnya dalam aktivitas *joint exercise* (Inkriwang, 2021). Pelaksanaan kegiatan *Garuda Shield* dalam pemerintahan SBY tidak terlepas dari latar belakang SBY yang sangat memahami pentingnya kegiatan ini dikarenakan beliau merupakan mantan pasukan perdamaian Indonesia yang memahami setiap kekurangan pasukan perdamaian yang dikirimkan ke wilayah konflik. Selain itu, reputasi buruk TNI atas apa yang telah terjadi pada masa orde baru membuat presiden SBY berupaya untuk meningkatkan kebijakan luar negeri Indonesia dengan menempatkan kementerian pertahanan dan TNI untuk mengambil peran secara global sebagai bagian dari *grand strategy* (Negara, Simandjuntak, & Fionna, 2019).

Joint exercise yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan Indonesia merupakan salah satu kegiatan pengaplikasian *defence diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan kemampuan bantuan militer dalam operasi perdamaian. Indonesia banyak melakukan aktivitas *defence diplomacy* dalam lingkup *joint exercise* dengan negara lain seperti Tiongkok, Singapura, bahkan Rusia namun tidak dalam tema *peacekeeping operation* seperti yang dilakukan Indonesia bersama Amerika Serikat. Keahlian militer Indonesia yang terlatih dalam *Garuda Shield* memberikan dampak yang besar terhadap kegiatan militer Indonesia di wilayah konflik Lebanon baik dalam upaya pengamanan jalur perbatasan maupun kegiatan manusia yang menjunjung nilai-nilai kebudayaan masyarakat lokal Lebanon.

b. *Promoting Democratic Civil-Military Relations: Humanitarian Assistance* Militer Indonesia Terhadap Masyarakat Lebanon

Penggunaan kerja sama dan bantuan militer merupakan bagian dari *defence diplomacy* yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap

masyarakat Lebanon yang terkena dampak dari konflik Israel-Hezbollah. Dalam pelaksanaannya, militer Indonesia di isi juga oleh pasukan non tempur seperti pasukan korps kesehatan, pasukan perdamaian wanita, serta militer yang memiliki pengetahuan rumpun ilmu sosial yang berguna untuk memulihkan keadaan masyarakat yang mengalami trauma. Pasukan militer Indonesia yang tergabung dalam misi *Civil Military Coordination* (CIMIC) memiliki peran penting untuk menarik hati masyarakat Lebanon. dalam kegiatannya, pasukan militer Indonesia meningkatkan hubungan militer-sipil yang baik dan bersifat demokratis.

Kegiatan CIMIC berorientasi terhadap kehidupan sosial termasuk kepada kehidupan anak-anak dan remaja warga sekitar. Untuk anak-anak terdapat kegiatan seperti *smart car*, kursus Bahasa Inggris dan komputer, pembangunan taman bermain, serta penyelenggaraan Hari Anak Nasional (Syahputri & Pattipeloehy, 2018). Beberapa kegiatan juga berkaitan dengan pemuda dan pemudi seperti pembuatan lapangan olahraga, penanganan serta pelatihan pertolongan kesehatan, dan kursus bahasa (Syahputri & Pattipeloehy, 2018). Untuk golongan masyarakat umum, pasukan militer Indonesia melakukan berbagai pendekatan silaturahmi ke beberapa tokoh serta membantu masyarakat dalam hal kesehatan, pertanian, dan merekonstruksi rumah serta fasilitas umum yang hancur akibat konflik maupun non konflik.

Selain merupakan bagian dari peran kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia terhadap masyarakat Lebanon, kegiatan tersebut berbanding lurus dengan tujuan Indonesia dalam meningkatkan eksistensinya di dunia Internasional. Beberapa keuntungan yang didapatkan Indonesia dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut ialah seperti melatih tindakan diplomatis militer Indonesia di zona konflik, membangun kepercayaan masyarakat Lebanon dan Internasional terhadap Indonesia, membangun *Confidence Building Measure* (CBM) terhadap negara pendonor lain yang bertugas di Lebanon, serta memulihkan nama baik TNI yang pernah

tercoreng atas pelanggaran HAM pada masa orde baru.

Disisi lain, kegiatan CIMIC juga menjadi jalur bagi pasukan perdamaian Indonesia dalam mempromosikan norma dan kebudayaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan baik dalam sebuah pentas seni kebudayaan maupun tindakan keseharian pasukan perdamaian yang mencerminkan norma-norma Indonesia seperti gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks ini, identitas menjadi sebuah nilai jual yang luar biasa bagi Indonesia di mana masyarakat Lebanon tidak melihat berbagai sikap pasukan perdamaian Indonesia yang dimiliki oleh pasukan perdamaian dari negara lainnya.

Selain bantuan yang dilakukan di wilayah berpendudukan, pasukan perdamaian Indonesia memiliki posisi di wilayah perairan Lebanon untuk menghentikan tekanan militer Israel yang berada di wilayah perbatasan laut. Perlengkapan Angkatan Laut Indonesia yang berada di dalam KRI memiliki peran penting dalam situasi konflik termasuk di dalamnya tugas-tugas kemanusiaan. Tugas-tugas tersebut antara lain seperti bantuan *search and rescue*, *Visit, Boat, Search and Seizure* (VBSS), *Winching* (penderekan), dan pemantauan dari udara yang dilengkapi dengan helikopter (Sirmareza, 2017).

c. *Enhancing Regional Peacekeeping Capabilities: Persiapan Penerjunan Peacekeeping Force Indonesia*

Enhancing Regional Peacekeeping Capabilities merupakan poin dari aktivitas *defence diplomacy* yang juga menjadi tujuan utama bangsa Indonesia dalam upaya perdamaian dunia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Penerjunan pasukan perdamaian Indonesia merupakan salah satu strategi utama dan menjadi paling dominan dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya dalam konflik yang terjadi di wilayah Lebanon selatan. Penurunan pasukan perdamaian dunia memiliki dasar yang sangat fundamental di mana terlandaskan baik di dalam piagam PBB maupun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Berdasarkan piagam PBB pada bab pertama dan pasal pertama tertulis kalimat “*to maintain international peace and security*” yang mana dalam hal ini merupakan kalimat yang memiliki arah yang sama terhadap pembukaan UUD 1945 sebagai sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Jika dilihat dari tujuan tersebut maka Penyelesaian konflik Lebanon merupakan salah satu tujuan dari dibentuknya PBB sehingga dalam

hal ini PBB memiliki kewajiban untuk mengintervensi penyelesaian konflik antara Israel dan Lebanon.

Menjadi bagian dari operasi perdamaian PBB, Indonesia sebagai sebuah negara yang berkomitmen terlibat dalam operasi tersebut melakukan langkah-langkah persiapan mulai dari sektor regulasi hingga pasukan. Diawali dari penurunan pasukan Indonesia di mesir pada tahun 1957, Indonesia yang dipimpin oleh Sukarno berupaya tetap berkontribusi dengan kemampuan pasukan seadanya yang belum memiliki keahlian khusus mengenai misi perdamaian dunia. Pada masa Soeharto, pengiriman pasukan perdamaian Indonesia sempat tidak mengalami perkembangan ketika TNI memiliki tugas yang sangat dominan terhadap stabilitas nasional serta hal-hal yang berkaitan dengan sosiopolitik di Indonesia.

Penyempurnaan regulasi dan kesiapan pasukan perdamaian Indonesia secara cepat dilakukan di masa pemerintahan presiden SBY. Hal tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan atau yang kita kenal dengan istilah *ideosinkretik*. SBY yang pernah menjabat sebagai *chief military officer* XIV di Bosnia pada tahun 1995-1996 menjadi suatu determinan bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya dalam penerjunan pasukan perdamaian (Hananto, 2020). Sebelumnya, terdapat beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia seperti UU Hubungan Luar Negeri, UU kepolisian, serta UU TNI yang notabene dibuat dalam rentang waktu antara tahun 1999-2004. Mengingat undang-undang ini dibuat berdasarkan semangat reformasi, maka diciptakan sebuah poin diantara undang-undang tersebut mengenai pengiriman pasukan perdamaian dunia yang salah satu tujuannya ialah untuk membuat TNI berkontribusi dalam perdamaian dunia di mana hal tersebut akan memperbaiki citra TNI yang sebelumnya sangat buruk di mata Internasional.

Pada tahun 2006, fenomena konflik yang terjadi antara Israel dan Lebanon menjadi sebuah garis besar momentum bagi Indonesia untuk berperan secara signifikan terhadap perdamaian dunia. Dalam konflik tersebut, Indonesia yang dipimpin oleh presiden SBY melihat keadaan di mana konflik yang ditimbulkan saat Israel

menyerang basis Hezbollah yang berada di Lebanon akan membawa dampak yang besar jika tidak segera ditangani. Terlebih lagi, terdapat ketidakpedulian negara-negara Arab serta Amerika Serikat terhadap apa yang dialami oleh masyarakat sipil di Lebanon Selatan (Rachmat & Ratmoko, 2019). Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 15 tahun 2006, maka Indonesia mengerahkan pasukan perdamaannya dengan jumlah kurang lebih 1000 personel ke wilayah konflik Lebanon (Rachmat & Ratmoko, 2019).

Setelah melewati berbagai macam misi perdamaian dunia, presiden SBY merasa diperlukannya sebuah strategi baru sehingga terdapat gagasan mengenai pembentukan lembaga-lembaga yang membantu pasukan Indonesia untuk memiliki keahlian yang mumpuni di medan tugas. lembaga-lembaga tersebut memiliki peran koordinasi, pelatihan personil, hingga kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat yang mana hal tersebut dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan baik yang terjadi antara dua belah pihak yang berkonflik maupun masyarakat sipil yang menjadi korbannya.

d. Pelaksanaan *Peacekeeping Operation* Militer Indonesia Dalam Misi Perdamaian Lebanon
 i. Pelaksanaan *Peacekeeping*

Secara sederhana, *peacekeeping* merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia terhadap konflik yang akan ditimbulkan kembali oleh kedua pihak yang berlawanan. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa pengamanan spontan maupun penagamanan terstruktur yang menjadi misi khusus bagi negara-negara yang tergabung di dalam UNIFIL.

Dalam misi pengamanan terstruktur, pasukan Indonesia yang bergabung di dalam UNIFIL akan melakukan pembagian tugas dengan pasukan dari negara lainnya. Dalam beberapa kasus, Indonesia melaksanakan upaya pencegahan konflik dengan menyisir daerah rawan konflik untuk memastikan agar tidak ada ranjau ataupun pasukan yang sedang bergejolak di suatu wilayah. Beberapa operasi yang dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia antara lain:

Operasi “Wadi Saluki”

Pasukan perdamaian Indonesia pada tanggal 21 Februari tahun 2007 mendapatkan

tugas dari UNIFIL untuk menjalankan operasi pengamanan dengan menyisir kawasan konflik dalam misi menghancurkan bunker penyimpanan amunisi. Hal tersebut merupakan bagian pelaksanaan dari resolusi Dewan Keamanan 1701 PBB. lokasi Wadi Saluki memiliki sejarah sebagai tempat pembantaian yang dilakukan oleh pasukan milisi *South Lebanon Army* (SLA) yang merupakan pasukan militer Lebanon yang pernah membelot pada masa perang sipil Lebanon. wilayah ini diduduki oleh masyarakat muslim Syiah yang sangat militan.

Operasi Wadi Saluki dilakukan oleh *peacekeepers* gabungan antar negara yang tergabung ke dalam UNIFIL serta berkejasama dengan pasukan militer Lebanon resmi. Dalam misi tersebut, Indonesia menurunkan satu pleton yang berkekuatan 40 personel menggunakan 4 Unit VAB APC sebagai bagian dari pasukan *Blue Ring*. Untuk membedakan pasukan perdamaian dan militer pemerintah terdapat perbedaan penggunaan baret yaitu biru untuk *peacekeepers* UNIFIL dan merah untuk militer pemerintah.

Operasi Wadi Saluki tidak mendapatkan hasil ketika pihak militer Lebanon membatalkan eksekusi secara sepihak. Militer Lebanon beralasan untuk menghindari kondisi memanas di perbatasan khususnya terhadap Hezbollah yang memiliki penduduk di wilayah tersebut. Pasukan pemerintah sebelumnya tidak memasuki wilayah tersebut dan baru memasukinya atas mandat dari Resolusi DK 1701. Pasukan militer Lebanon menilai masih terlalu awal untuk melakukan eksekusi dan lebih memilih menunggu waktu yang tepat (Kusuma, 2016).

Operasi “Fork”

Kegagalan operasi Wadi Saluki membuat para *peacekeepers* UNIFIL berupaya melakukan operasi pengganti yang lebih taktis. Operasi Fork dibuat dengan tiga tahapan operasi, yaitu penutupan, pengintaian, dan pembersihan. Demi kelancaran eksekusi tugas tersebut maka terdapat sebuah mekanisme di mana jika ditemukannya objek yang dicari maka tidak langsung ditindak oleh pasukan UNIFIL

melainkan di berikan kepada Tim EOD Brigade 11 LAF militer Lebanon untuk tahap selanjutnya. Hal tersebut dilakukan untuk memperbesar peran serta militer Lebanon terhadap misi tersebut. Seperti operasi sebelumnya, operasi ini kembali tidak menghasilkan sesuatu dan ditunda dikarenakan pihak militer Lebanon menghentikan secara sepihak. Pemberhentian secara sepihak dilakukan oleh militer Lebanon dikarenakan terdapat permasalahan internal lain yang menjadi urgensi bagi negara Lebanon (Kusuma, 2016).

Operasi “Quite Driver”

Operasi ini dilakukan pada awal bulan September 2007 setelah pasukan INDOBATT menerima Frago “QRF Long Range Patrol II Sector East” dari UNIFIL pusat. Dalam operasi ini diturunkan pasukan *Quick Reaction Force* (QRF) yang melakukan pergerakan antara tanggal 4-6 September 2007. Operasi “*Quiete River*” merupakan operasi patroli jarak jauh yang dilakukan di wilayah sungai Litani antara M-2 dan M-3 yang merupakan bagian dari daerah operasi INDOBATT (Kusuma, 2016).

Dalam operasi ini, pasukan INDOBATT mengerahkan 4 kompi pasukan serta pasukan bantuan untuk menyukseskan kegiatan operasi. Terdapat tugas dari masing-masing kompi diantaranya ; kompi A melaksanakan operasi imbangan dengan mengeluarkan satu regu patroli, dua APC dan 14 personel untuk membentuk *static point* di jembatan M-2 dalam upaya memonitori pembersihan ; kompi B melakukan operasi imbangan dan patroli secara berkala serta melakukan *link-up* dengan TCP QRF yang setiap saat sedia memberikan bantuan; kompi C melaksanakan operasi imbangan dengan tiga regu patroli yang membentuk tiga *static point*; kompi D melakukan operasi imbangan dan berpatroli secara berkala dengan MBT QRF; sedangkan kompi bantuan mendukung seluruh unsur pelayanan terhadap pasukan INDOBATT yang sedang melaksanakan misi imbangan (Kusuma, 2016). Pasukan INDOBATT Kontingen Garuda merupakan *peacekeeping force* Indonesia yang mengambil bagian dalam misi UNIFIL. Pasukan tersebut sesuai dengan mandat PBB serta peraturan perundang-undangan Indonesia ditugaskan khusus untuk menangani berbagai masalah perdamaian yang berada di wilayah Lebanon.

i. *Peacemaking*

Dalam sejarahnya, Israel dan Lebanon pernah melakukan upaya *peace agreement* pada tahun 1983. Perjanjian tersebut memuat sebuah

kesepakatan bahwa pasukan Israel akan meninggalkan wilayah Lebanon dari wilayah yang sebelumnya menjadi pendudukannya. Namun dikarenakan terjadinya peristiwa penculikan pasukan Israel oleh Hezbollah, perjanjian tersebut tidak dihiraukan lagi oleh Israel. Seiring berjalannya dinamika konflik antara Israel dan Lebanon, pada tanggal 2 Oktober 2020 kemarin kedua belah pihak secara terbuka sepakat untuk mengadakan mediasi yang ditengahi oleh PBB (Syahrianto, 2020). Mediasi tersebut ditujukan terhadap penyelesaian konflik kedua negara yang bersengketa baik di wilayah darat maupun laut.

Berdasarkan situasi hubungan Lebanon dan Israel saat ini, dorongan kedua negara untuk melakukan mediasi terhadap konflik yang telah terjadi hingga beberapa dekade sebelumnya tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan perdamaian PBB yang tergabung di dalam UNIFIL. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengklaim bahwa situasi keamanan Lebanon sebagian besar merupakan bagian dari kerja keras pasukan perdamaian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah pasukan perdamaian yang dikirimkan oleh Indonesia untuk UNIFIL yang merupakan jumlah terbanyak dari negara-negara lainnya. selain itu, perilaku pasukan Indonesia yang dapat diterima baik oleh penduduk Lebanon Selatan membuat tekanan sipil terhadap situasi konflik semakin meredam. Jika situasi ini terus berada dalam keadaan baik dan terjadinya mediasi, maka Indonesia telah berhasil melakukan upaya *peacemaking* terhadap konflik Israel dan Lebanon.

ii. *Peacebuilding*

Membahas mengenai keterlibatan pasukan perdamaian Indonesia dalam menciptakan *peacebuilding* di Lebanon maka hal tersebut masih dalam bentuk proses dan belum dapat diwujudkan dalam bentuk sebuah perubahan tatanan. Dalam pembahasan pada bagian *peacemaking* sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pasukan Indonesia berhasil membawa Lebanon dan Israel untuk melakukan mediasi. Setelah kegiatan mediasi yang akan dilakukan membuahkan hasil, maka Indonesia telah sukses melaksanakan upaya *peacemaking* dan menjadi jalur bagi Indonesia untuk

mengupayakan tindakan-tindakan *peacebuilding*. Dalam konteks konflik Lebanon dan Israel, upaya *peacebuilding* mulai terlihat ketika kedua pihak yang berkonflik telah cukup lama tidak saling menyerang dan berupaya untuk dimediasi. Dengan kata lain, Lebanon dan Israel masih menuju untuk mewujudkan upaya *peacemaking* sehingga secara bertahap hal tersebut akan membawa kedua negara untuk melaksanakan upaya *peacebuilding*.

Dalam upaya untuk mewujudkan upaya *peacebuilding* di daerah konflik, pada tanggal 11 Oktober 2019 silam, Rosemary DiCarlo yang merupakan *secretary general for political and peacebuilding affairs* melakukan kunjungan ke markas besar UNIFIL di Naqoura. Lebanon Selatan (UNIFIL, 2019). Dalam kunjungan tersebut perwakilan PBB, pasukan perdamaian, serta pihak otoritas Lebanon membicarakan peningkatan kerja sama dengan lembaga pemberdayaan perempuan dan anak-anak di Lebanon Selatan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya *peacebuilding* yang sudah mulai diupayakan oleh PBB dan pasukan perdamaian di wilayah Lebanon.

SIMPULAN

Pelaksanaan aktivitas *defence diplomacy* memprioritaskan terhadap tujuan-tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya oleh militer Indonesia dikarenakan terdapat tujuan-tujuan idealis dan pragmatis yang akan diraih oleh Indonesia. Secara idealis, penerjunan pasukan perdamaian akan menjadi jalan bagi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung di dalam UUD 1945. Secara pragmatis, aktivitas *defence diplomacy* memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mencegah timbulnya musuh baru. Selain itu, penerjunan pasukan perdamaian dengan mempertontonkan alutsista dan kemahiran pasukannya baik dalam misi atau operasi perdamaian maupun pertempuran akan menimbulkan efek *deterrence* terhadap negara-negara lainnya khususnya yang tergabung di dalam UNIFIL.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai pasukan perdamaian UNIFIL, militer Indonesia akan memulihkan nama baiknya di mana dalam beberapa peristiwa sejarah terdapat catatan buruk mengenai pelanggaran HAM yang

dilakukan di beberapa operasi. Perbaikan citra tersebut memiliki pengaruh yang sangat signifikan mengingat HAM merupakan sebuah nilai-nilai universal bagi semua negara yang tergabung di dalam Majelis Umum PBB. Dengan peningkatan citra tersebut maka Indonesia kedepannya akan mampu mengharmonisasi hubungannya dengan negara lain dan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan dan membuka kerja sama dalam berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayala, J. E. de. (2006). *Peacekeeping in Lebanon: a necessary but insufficient risk (ARI)*. Retrieved January 7, 2020, from Royal Instituto Elcano website: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari+95-2006
- Bhatti, C. (2009). *Exercise Garuda Shield 2009 opens in Indonesia*. *U.S. Army*. Retrieved from https://www.army.mil/article/22841/exercise_garuda_shield_2009_opens_in_indonesia/
- Cole, E. (2011). *Hawaiian Reservists strengthen U.S., Indonesian partnership through humanitarian mission*. *Hawai'i Free Press*. Retrieved from <https://www.hawaii-freepress.com/Articles-Main/ID/4481/Hawaii-Army-Reservists-building-Community-Center-in-Indonesia>
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge.
- Douglas, C. (2011). *US, Indonesia partner for Exercise Garuda Shield 2011*. *U.S. Army*. Retrieved from https://www.army.mil/article/59478/us_indonesia_partner_for_exercise_garuda_shield_2011
- Hananto, A. (2020, April 21). *Mengenal Kontingen Garuda, dan Peran Indonesia Menjaga Perdamaian Dunia*. *Good News from Indonesia*. Retrieved from <https://www.goodnewsfromindonesia.i>

- d/2020/04/21/mengenal-kontingen-garuda-dan-peran-indonesia-menjaga-perdamaian-dunia
- Hiebertand, M., & Magpile, J. (2012, September 28). Comprehensive Partnership Nudges U.S.-Indonesia Relations to New Levels of Cooperation. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/comprehensive-partnership-nudges-us-indonesia-relations-new-levels-cooperation>
- Hutabarat, L. F. (2018). Diplomasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(2), 75–96. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i2.308>
- Inkriwang, F. W. (2021). ‘Garuda shield’ vs ‘sharp knife’: operationalising Indonesia’s defence diplomacy. *The Pacific Review*, 34(6), 871–900. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1772352>
- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. (2019). TNI-AD dan Angkatan Darat AS di Pasifik Gelar Latihan Bersama Garuda Shield 2019 di Jawa Timur, Indonesia. Retrieved September 20, 2021, from Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia website: <https://id.usembassy.gov/id/tni-ad-dan-angkatan-darat-as-di-pasifik-gelar-latihan-bersama-garuda-shield-2019-di-jawa-timur-indonesia/>
- Kusuma. (2016). *Pasukan Perdamaian Indonesia Kontingen Garuda di Lebanon (Kajian Perjumpaan Masyarakat Muslim Indonesia dan Lebanon)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. London: Sage Publications.
- Meister, T. (2013). Garuda Shield 13 brings new aircraft to Indonesia. *Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS)*. Retrieved from <https://www.dvidshub.net/news/109859/garuda-shield-13-brings-new-aircraft-indonesia>
- Negara, S. D., Simandjuntak, D., & Fionna, U. (2019). *Aspirations with Limitations: Indonesia’s Foreign Affairs under Susilo Bambang Yudhoyono*. Singapore: ISEAS–Yusuf Ishak Institute.
- Rachmat, A. N. (2017). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Kontingen Garuda/ UNIFIL Tentara Nasional Indonesia Di Lebanon Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2543.1-14>
- Rachmat, A. N., & Ratmoko, K. (2019). Determinan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Peningkatan Partisipasi Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa: Studi Terhadap Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2009. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Unjani Expo (UNEX) I*, 4–9. Cimahi: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani. Retrieved from <https://journal.unjani.ac.id/index.php/unex/article/view/17%0A>
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2006). *Contemporary Conflict Resolution*. New York: Polity Press.
- Sempiga, O. (2017). Peacekeeping, peacemaking, and, peacebuilding: Towards positive peace in a society that endured conflict. *World Environment and Island Studies (WEIS)*, 7(4), 185–200.
- Simamora, P. (2013). *Opportunities and Challenges of Defense Diplomacy*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirmareza, T. (2017). Naval Diplomacy dalam Pengiriman Satuan Tugas Maritim Tentara Nasional Indonesia di United Nations Interim Force in Lebanon. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33172/jdp.v3i1.82>
- Stake, R. E. (2010). *Qualitative Research: Studying How Things Work*. New York: The Guilford Press.
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & Waluyo, S. D. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83–102. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>
- Sukadis, B. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*,

- 1(1), 92–123.
<https://doi.org/10.33822/mjihi.v1i1.285>
- Syahputri, R. E., & Pattipelohy, S. C. (2018). Identitas dan Kepentingan Indonesia Berpartisipasi dalam UN Peacekeeping Operations pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. *Journal International Relations Universitas Diponegoro (JIRUD)*, 4(3), 519–528. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21154>
- Syahrianto, M. (2020). Ditengahi PBB, Lebanon-Israel Janji Siap Bereskan Sengketa... *Warta Ekonomi*. Retrieved from <https://wartaekonomi.co.id/read306937/ditengahi-pbb-lebanon-israel-janji-siap-bereskan-sengketa>
- Umma, K., & Tjarsono, I. (2019). Diplomasi Indonesia terhadap Negara Kontributor dalam Misi UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) Tahun 2018. *JOM Fisip Unri*, 6(2), 1–15.
- United Nations. (1996). *The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping*. United Nations Publications.